



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 277 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat dari Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 12 Agustus 1952 No. 2648/BTTK/Rah., beserta lampiran-lampirannya dalam surat mana ternjatalah, bahwa pada malam 8/9 Oktober 1950 telah terdjadi pembongkaran di kantor telepon Ampenan, jang mengakibatkan hilang pada waktu itu uang hasil pemungutan kwitansi-kwitansi telepon sedjumlah Rp. 9.548,50;
2. Surat Menteri Perhubungan tanggal 16 Oktober 1952 No. K.2/1/17 Rah;
3. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 4 Nopember 1952 No. G.4270/52;

- Menimbang : a. Bahwa oleh karena kedjadian tersebut di atas kas kepala kantor gabungan telepon di Denpasar, selaku bendaharawan atas keuangan kantor telepon Ampenan, telah kekurangan Rp. 9.548,50;
- b. Bahwa kekurangan termaksud sudah pasti bukan disebabkan karena kesalahan, kealpaan atau kelalaian, baikpun dari Pengurus kantor telepon Ampenan, maupun dari Kepala Kantor gabungan telepon di Denpasar;
- c. Bahwa baik pemeriksaan jang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun dengan setjara administratif, tidak membawa hasil sebagaimana jang diharapkan dan seperti dapat diketahui, tentang perampokan itu tidak mungkin mendapat keterangan lebih landjut;

Mengingat : Keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, No. 25 (Lembaran Negara No. 2 tahun 1915).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan uang sedjumlah Rp. 9.548,50 (sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan 50/100 rupiah) dari daftar perhitungan Bendaharawan Kantor Gabungan telepon di Denpasar, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Perhubungan,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung,
5. Kepala Kantor Gabungan Telepon di Ampenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Nopember 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.

DJUANDA.